

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di awal tahun 2020 muncul penyakit Covid-19 pertama di Indonesia, yang kemudian menyebar luas ke seluruh Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian mengumumkan bahwa Covid-19 sebagai pandemi dan bencana nasional. Dengan keberadaan pandemi Covid-19, pemerintah terpaksa menerapkan kebijakan immobilisasi demi menekan penyebaran virus. Dampak dari adanya pandemi Covid-19 begitu luas merambah ke berbagai sektor. Kesehatan menjadi sektor yang paling terdampak parah karena adanya Covid-19. Selain sektor Kesehatan yang berjuang keras melawan Covid-19, salah satu sektor yang terdampak lainnya adalah bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan drastis akibat lemahnya produktivitas masyarakat. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh (Hadiwardoyo et al., 2020), dijelaskan bahwa Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 semula diperkirakan sebesar 5,3%, Namun angka ini terkoreksi sebagai dampak pandemi Corona, dan sebagian kalangan memprediksikan pertumbuhan di bawah 2%.

Salah satu daerah dengan dampak pandemi Covid-19 terparah adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa menjadi pulau dengan jumlah penduduk tertinggi di Indonesia

dan menjadi pusat dari kegiatan perekonomian di Indonesia. Hal tersebut yang mengakibatkan penyebaran Covid-19 di Pulau Jawa menjadi sangat cepat. Pulau Jawa menjadi daerah paling berat terdampak Covid-19, terhitung kasus Covid-19 terbanyak ada di pulau Jawa. Menurut data dari Kementerian Kesehatan per 19 Desember 2021, ada 2.749.613 kasus positif Covid-19 di enam provinsi di pulau Jawa. Akibatnya pemerintah daerah di Pulau Jawa menerapkan kebijakan yang lebih ketat dibandingkan dengan daerah di luar Pulau Jawa. Dengan predikat daerah yang terdampak paling parah karena Covid-19, hal tersebut berimbas pula kepada struktur dan postur APBD Pemprov di Pulau Jawa

Pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan akibat Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia juga berdampak pada perubahan struktur dan postur APBD Pemda. Perombakan APBD Pemda ini merupakan akibat dari lesunya penerimaan pendapatan daerah di berbagai sektor. Sebagai contoh yaitu perubahan APBD Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2020. Dikutip dari laman berita *bisnis.com* (Aziz Rahardyan, 2020), disebutkan bahwa Jajaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengajukan penyesuaian APBD untuk dibahas bersama DPRD DKI Jakarta. Proyeksi Pemprov DKI menyebut angka total APBD TA 2020 sebesar Rp47,1 triliun, turun 47 persen dari pengesahan awal Rp87,9 triliun. Perubahan struktur APBD ini tidak hanya terjadi di Pemprov DKI Jakarta saja namun terjadi di seluruh daerah terdampak Covid-19.

Perubahan struktur APBD merupakan efek dari penerimaan pendapatan yang mengalami penurunan. Pendapatan dalam struktur dan postur APBD terbagi menjadi beberapa kelompok. Berdasarkan Permendagri No. 64 tahun 2020 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, pendapatan daerah dibagi menjadi tiga kelompok utama yaitu pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain – lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, pajak retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Kemudian, lain – lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan yang bisa berasal dari pendapatan hibah, dana darurat dan lain – lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh menurunnya realisasi pendapatan daerah, dari jurnal yang ditulis oleh Fajariah (2021) dari penelitiannya di Kabupaten Lumajang, dijelaskan bahwa dari anggaran pendapatan daerah sebesar Rp61.246.000,00 hanya mampu direalisasikan sekitar 66% saja yaitu sebesar Rp40.961.000.

Banyak sumber penerimaan pendapatan daerah mengalami kemerosotan pada kondisi pandemi Covid-19,. Salah satu pendapatan daerah yang paling jelas mengalami penurunan adalah pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun antar daerah. Padahal mayoritas dari penerimaan daerah berasal dari pendapatan transfer ke daerah, hal tersebut tentu sangat berpengaruh pada APBD pemda terkait. Hal ini merujuk dari dikeluarkannya Perpres No. 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Dikutip dari laman berita *bisnis.com* (Muhamad Wildan, 2020), dijelaskan bahwa berdasarkan Perpres tersebut, total TKD yang pada APBN 2020 dianggarkan sebesar Rp784,94

triliun berkurang menjadi Rp691,52 triliun, berkurang Rp88,1 triliun. Pemangkasan terbesar terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) di mana dana tersebut berkurang dari Rp427,1 triliun menjadi Rp384,4 triliun. Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) yang awalnya dianggarkan sebesar Rp117,6 triliun juga dipangkas menjadi Rp89,8 triliun. Dana Transfer Khusus (DTK) secara keseluruhan dipangkas Rp19,6 triliun dari Rp202,5 triliun menjadi Rp183 triliun.

APBD di berbagai daerah pada masa pandemi Covid-19 telah banyak mengalami koreksi. Koreksi APBD selain disebabkan karena penerimaan pendapatan yang mengalami penurunan, disebabkan juga karena adanya belanja tidak terduga yang diperuntukkan untuk penanggulangan Covid-19. Beban APBD yang bertambah menyebabkan pemerintah memberikan instruksi kepada Pemda untuk melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2020, tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Belanja tidak terduga yang timbul diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, serta penyediaan hibah atau bantuan sosial. Sebagai contoh, melihat dari penelitian yang dilakukan di Kota Bengkulu oleh Lestari (2021), tahapan *refocusing* dan realokasi anggaran dibagi menjadi dua tahap serta ada tiga prioritas kegiatan yang

mendapatkan pendanaan dari dana *refocusing* anggaran yaitu penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan jaringan pengamanan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020, Defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Menurut sumber lain, “Defisit anggaran adalah suatu kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran yang lebih besar dari pendapatan negara untuk memberi stimulus pada perekonomian.”(Aghsilni & Putri, 2020). Merujuk dari riset terdahulu yang dilakukan oleh Aghsilni dan Putri (2020), dijelaskan bahwa ada beberapa penyebab pemerintah memberlakukan kebijakan defisit anggaran antara lain untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, melakukan pemerataan pendapatan masyarakat, mengatasi melemahnya nilai tukar, meningkatnya pengeluaran akibat krisis ekonomi, realisasi yang menyimpang dari rencana dan meningkatnya pengeluaran karena inflasi. Sedangkan menurut studi lain yang dilakukan oleh (Ramadhan & Ika Purnama, 2021), ada dua faktor utama penyebab defisit APBD yaitu menurunnya jumlah realisasi pendapatan dari PAD, dan meningkatnya jumlah utang DBH. Kemudian merujuk juga dari studi lain yang dibuat oleh Prihatiningsih (2013), dijelaskan bahwa defisit anggaran pada suatu daerah bisa terjadi karena adanya kebijakan dari pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan, dimana diperlukan investasi yang besar dan dana yang besar pula. Dari beberapa penelitian tersebut diketahui bahwa penyebab defisit pada umumnya dikarenakan realisasi anggaran pendapatan yang mengalami kemerosotan dan meningkatnya pengeluaran akibat sebab tertentu.

Di masa sekarang ini, pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab menurunnya pendapatan daerah serta penyebab meningkatnya belanja daerah, sehingga pemerintah perlu melakukan kebijakan *refocusing* anggaran. Hal tersebut bisa saja menjadi indikator terjadinya defisit APBD di daerah terdampak. Dimana pulau Jawa menjadi daerah yang paling terdampak akibat Covid-19. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan terkait hal tersebut dan menyusun Karya Tulis Tugas Akhir dengan Judul “TINJAUAN PENGARUH PANDEMI COVID 19 TERHADAP DEFISIT APBD PEMERINTAH PROVINSI DI PULAU JAWA”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir adalah :

1. Apakah komponen pendapatan daerah yang paling mempengaruhi timbulnya defisit APBD Pemprov di Pulau Jawa pada masa Covid-19??
2. Bagaimana pengaruh koreksi pendapatan transfer daerah terhadap defisit APBD Pemprov di Pulau Jawa?
3. Apakah komponen belanja daerah yang paling mempengaruhi timbulnya defisit APBD Pemprov di Pulau Jawa pada masa Covid-19?
4. Bagaimana akibat dari kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran terhadap defisit APBD Pemprov di Pulau Jawa?
5. Apakah rencana dan strategi yang harus dilakukan Pemprov di Pulau Jawa untuk mengatasi defisit APBD akibat pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir, yaitu :

1. Mengetahui komponen pendapatan yang paling berpengaruh terhadap timbulnya defisit APBD Pemprov di Pulau Jawa pada masa pandemi Covid-19
2. Meninjau dampak yang timbul akibat adanya koreksi pendapatan transfer daerah terhadap defisit APBD Pemprov di Pulau Jawa
3. Mengetahui komponen belanja yang paling berpengaruh terhadap terjadinya defisit APBD Pemprov di Pulau Jawa pada masa pandemi Covid-19
4. Meninjau dampak yang timbul dari kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran terhadap defisit APBD Pemprov di Pulau Jawa.
5. Mengetahui rencana dan strategi yang perlu dilakukan Pemprov untuk mengatasi timbulnya defisit APBD pada masa pademi Covid-19

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis hanya fokus membahas terkait pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan APBD Pemprov yang ada di pulau Jawa. Penulis membatasi hanya membahas Pemprov di Pulau Jawa karena Pulau Jawa menjadi daerah dengan kasus Covid-19 tertinggi di Indonesia, yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam penanganannya.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan akan memberikan manfaat, yaitu:

1. Karya tulis tugas akhir ini diharapkan menjadi sarana bagi penulis untuk menerapkan ilmu terkait Akuntansi Pemerintah yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan dan menjadi syarat bagi penulis untuk lulus program studi DIII Akuntansi.

2. Karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman terkait kondisi APBD Pemprov di Pulau Jawa pada masa pandemi Covid-19.
3. Karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait defisit APBD yang terjadi di Pulau Jawa pada masa pandemi Covid-19.
4. Karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak lain di kemudian hari.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan. Latar belakang berisikan informasi tentang fenomena dan problematika yang menarik untuk dikaji. Tujuan penulisan berisikan capaian yang ingin diselesaikan pada karya tulis ini. Ruang lingkup berisikan batasan banyaknya subjek yang dikaji. Manfaat Penulisan berisikan gambaran hal – hal yang akan diperoleh setelah selesai membuat karya tulis. Sistematika penulisan berisikan alur dan urutan penyelesaian karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan penjelasan tentang teori dan pendapat dari para ahli, serta peraturan – peraturan terkait yang menjadi dasar penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini. Teori, pendapat dan peraturan yang digunakan pada karya tulis ini akan berkaitan dengan judul yang digunakan yaitu Judul “TINJAUAN PENGARUH

PANDEMI COVID 19 TERHADAP DEFISIT APBD PEMERINTAH PROVINSI DI PULAU JAWA”.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil pembahasan dari topik karya tulis, yaitu tinjauan pengaruh Covid-19 terhadap defisit APBD Pemprov di Pulau Jawa. Hasil pembahasan ini berdasarkan dari landasan teori dan analisis terkait isu – isu mengenai defisit APBD dimasa pandemi Covid-19. Pada bab ini penulis juga melakukan perbandingan APBD Pemprov di Pulau Jawa sebelum terjadi pandemi dengan APBD setelah terdampak pandemi, untuk mengetahui perbedaan kondisi anggaran pada setiap Pemprov di Pulau Jawa

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian Karya Tulis Tugas Akhir yang telah dibahas pada bab – bab sebelumnya dan diharapkan bisa bermanfaat bagi pihak terkait yang membutuhkan.